

REKRUITMEN TOKOH DALAM MENUJU INDONESIA BERSATU

Oleh : Subari¹

Abstract

This work contains an ideal description of prominent figure that is assumed as a proper person to be recruited in the effort of Indonesia unification. Briefly, the topic we will discuss in this paper is dealing with a wish of a few people to return to the past in gaining the prominent figure and the importance of having a leader that respectful with the democratic spirit as a continuing capital in mobilization of whole people's capability in the direction of Indonesian unification. As a result of the discussion, we will argue that according to the plural condition of Indonesia, the recruitment of a prominent figure should be departed from the smallest rural area that has ability in programming the collaboration with some other areas. The collaboration should be based on the sameness of both vision and mission of his or her political party. But as we have known, most of Indonesian community member knows more about the prominent figure than the vision and mission of political party. Therefore, to win in the local-general election, a political party depends on the influence of prominent figure. Ironically, most of the prominent figure that contribute much in winning the election, he or she is not supported by party's policy.

Keywords: Prominent figure, Indonesia unification, collaboration, influence

A. Pendahuluan

Sejak mengalami krisis, yaitu pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami pergantian presiden empat kali. Apabila dilihat kemampuan masing-masing presiden, mereka mewakili komunitas yang berbeda, yaitu teknokrat (Habibi), jender (Megawati), humanis (Abdurrahman) dan militer (Susilo Bambang Yudoyono).

¹Subari Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

Meskipun reformasi telah berjalan lebih dari sewindu dan tokoh yang berasal dari komunitas yang berbeda telah diberi kesempatan untuk memimpin negara Indonesia tetapi cita-cita reformasi masih jauh dari yang diinginkan. Beberapa permasalahan yang timbul, yaitu apakah ketidakberhasilan itu terletak pada informasi yang diterima oleh tokoh (pelaku), apakah terletak pada proses pengolahannya, atau *output* yang diinginkan tidak sesuai dengan kemampuan (Fatah, 2006).

Sesuai dengan maknanya, reformasi mengandung pengertian perubahan, dan keinginan itu bukan hanya perubahan biasa, yang berbeda dengan sebelumnya tetapi lebih menyangkut masalah strategi, manajemen, dan juga menyangkut substansi. Oleh karena perubahan yang diinginkan reformasi begitu berat sehingga masalah yang timbul bukan hanya bagaimana mengupayakannya, tetapi siapa yang mampu mengusahakannya mengingat sebagian besar tokoh di Indonesia sudah terbiasa hidup dengan gaya orde baru yang tidak sejalan dengan reformasi.

Tokoh yang menamakan diri sebagai reformis tidak hanya telah gagal melakukan perubahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tetapi juga mulai menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap tokoh yang pada gilirannya mengakibatkan adanya krisis tokoh di Negara Indonesia, maka timbullah keinginan masyarakat untuk kembali pada sistem yang dilakukan sebelum reformasi.

Mungkin terlalu prematur untuk membedakan zaman orde baru dengan orde reformasi dengan mengatakan bahwa orde baru ditandai dengan adanya krisis multi dimensi yang berujung pada krisis moral; sedangkan orde reformasi ditandai dengan gagalnya menangani krisis yang berimplikasi pada krisis tokoh. Kegagalan untuk mendapatkan tokoh pada zaman reformasi bukan hanya di tingkat pusat saja tetapi juga terjadi di tingkat yang di bawahnya: propinsi atau kabupaten.

Apabila pernyataan seperti itu belum dapat dipandang sebagai hipotesis tetapi paling tidak dapat dipakai sebagai wacana yang perlu mendapat perhatian, yang digunakan sebagai bahan renungan untuk memberi masukan dalam rangka memperoleh tokoh yang dapat mengemban semangat reformasi. Keinginan untuk mendapatkan tokoh sebagai pengemban reformasi, bukan hanya untuk mencegah keinginan untuk kembali pada masa orde baru tetapi yang lebih penting adalah mendapatkan tokoh yang

menghargai yang telah ada, yaitu semangat demokrasi sebagai modal selanjutnya dalam rangka memobilisasi seluruh kemampuan yang dimiliki rakyat dalam arti positif untuk menuju Indonesia bersatu.

B. Fungsi, Peran dan Kondisi *Existing* Tokoh di Indonesia

Orde Reformasi belum berhasil mengatasi krisis yang diwariskan oleh orde baru, ditambah dengan adanya krisis tokoh selama perjalanan orde reformasi, bukan hanya menyebabkan semakin panjang rentetan penderitaan rakyat tetapi juga menimbulkan kesulitan untuk mencari tokoh sebagai agen perubahan. Kekhawatiran seperti itu seharusnya tidak perlu terjadi apabila bertolak pada kondisi *existing* Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Apabila dilihat, baik dari segi SDA maupun SDM, Negara Indonesia memiliki posisi lebih menguntungkan dibandingkan dengan negara lain. Hal itu terlihat bukan hanya luas dan kandungan alam yang dimiliki tetapi juga tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Sebagai bukti bahwa anak bangsa Indonesia memiliki tingkat kecerdasan lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain terlihat pada perolehan juara olimpiade dalam bidang matematika, fisika dan biologi di tingkat internasional.

Seorang ahli negara berkembang yang telah menjadi penasihat beberapa negara di antaranya Vietnam, China, Brasil dan Kostarika bernama Prof Michael Porter berpendapat bahwa Indonesia memiliki kelebihan SDA yang melimpah, dan Indonesia pada saat ini juga memiliki pemimpin yang baik dan memiliki banyak pemikir, tetapi anehnya Indonesia masih dalam kondisi *stagnan* (Porter, 2006). Salah satu penyebab Indonesia tidak dapat berkembang, di samping karena faktor moral tetapi juga karena tidak adanya kolaborasi di antara tokoh, serta tidak adanya rasa *win-win opportunity* sehingga setiap tokoh, atau golongan tidak merasa menjadi bagian dari tim yang lain. Kondisi seperti itu terlihat, baik pada sikap pemerintah maupun swasta, tokoh formal maupun informal yang lebih menyibukkan diri untuk merebut *kue* yang telah ada bukan memperbesar *kue* sebagai bentuk pengembangan modal yang telah tersedia. Masing-masing tokoh berusaha untuk memproteksi diri dan tidak melakukan kerjasama agar terjadi penyatuan kemampuan, serta tidak memberi akses

yang lebih banyak terhadap pengetahuan dan riset sebagai alat untuk mengembangkan kreativitas.

Gejala itu dapat dilihat pada sikap tokoh yang selalu memberikan kemudahan terhadap pengikutnya dan menghambat bagi orang yang bersebarangan sistem pendanaan pendidikan yang kurang dari 20 %. Kebijakan semacam itu akan melahirkan pengkultusan tokoh yang tidak elegan, tidak rasional dan kurang kreatif.

Kelebihan kecerdasan anak Bangsa Indonesia atas negara lain hanya sebatas pada kecerdasan individual bukan pada komunitas sehingga kurang berdampak terhadap perubahan Bangsa Indonesia. Dalam situasi seperti ini maka diperlukan satu upaya pengembangan kecerdasan individual menuju kecerdasan komunitas, yang pada gilirannya bukan hanya melahirkan tokoh tetapi juga pengembangbiakan tokoh sebagai potensi agen perubahan.

Pengembangan kecerdasan para tokoh sebagai pengendali komunitas hendaknya dilakukan secara rasional agar tidak menimbulkan kecerdasan individual yang lebih besar. Kekhawatiran semacam ini bukan hal yang tidak mungkin mengingat adanya otonomi daerah yang mempunyai akses terhadap pengkultusan suku, agama, dan adat yang pada gilirannya tidak hanya menghambat pengembangan kreativitas, tetapi juga kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) cenderung mengalami destorsi.

Menurut Arnold Toynbee peradaban besar tidak pernah dibangun oleh orang banyak tetapi oleh beberapa orang yang kreatif. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa perubahan besar selalu dimulai dari satu atau dua orang yang ahli dan orang tersebut selalu melakukan pengembangbiakan, baik secara substansi maupun pelaku sebagai bentuk kreativitas dan kerjasama.

Apabila uraian tersebut di atas dikaitkan dengan kondisi tokoh formal di Indonesia, maka akan diperoleh keterangan bahwa fungsi tokoh di samping pembentuk opini tetapi juga sebagai penjaga komunitas yang mampu mengembangkan kerjasama secara kreatif. Dari empat fungsi tersebut, tokoh formal lebih banyak melaksanakan fungsinya sebagai pembentuk opini yang kreatif dan belum banyak melakukan fungsi kerjasama dan melestarikan komunitasnya. Persoalan selanjutnya adalah

bagaimana memperoleh tokoh yang dapat melaksanakan keempat fungsi tersebut yang mendukung penguatan kedudukan NKRI.

C. Penjaringan Tokoh Formal

Pada hakikatnya semua orang adalah pemimpin dan pemimpin memiliki kewajiban asasi, yaitu melaksanakan amanah dari yang dipimpinnya. Dengan melihat fungsi dan peran pemimpin seperti itu, seharusnya seorang pemimpin memiliki sifat juang dan menjunjung moralitas yang pada gilirannya lebih mengedepankan sifat ingin melayani daripada dilayani, tetapi dalam kenyataannya figur pemimpin sebagai tokoh di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, yaitu lebih suka dilayani daripada melayani (Tanjung, 2006).

Semua persoalan bangsa Indonesia telah disadari oleh tokoh formal maupun non formal, dan masing-masing tokoh telah berusaha untuk mengatasinya agar Bangsa Indonesia segera mengubah paradigma dari pola pikir yang bersifat memikirkan dirinya sendiri, saling menghancurkan, dan cepat puas dengan yang dihasilkan menjadi pola pikir yang suka bekerjasama untuk meningkatkan produktivitas sebagai bentuk kreativitas kelompok dalam menghadapi persaingan global. Sampai saat ini, usaha yang dilakukan oleh para tokoh belum menunjukkan perubahan yang signifikan, bahkan cenderung menghasilkan sederatan kebijakan panjang dan tidak efisien, yang hampir terjadi pada segala bidang. Di samping itu, usaha yang dilakukan sering menghasilkan tokoh baru yang cenderung berorientasi pada kesukuan, kedaerahan dan ras yang pada gilirannya menghambat terbentuknya tokoh nasional yang memiliki sifat kreatif, menjaga komunitas (NKRI), bekerjasama dan sebagai pembentuk opini dalam menghadapi persaingan global.

Persoalannya, adakah kiranya kesalahan dalam rekrutmen tokoh nasional Indonesia dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 2004. Berbagai badan internasional menilai pemilu di Indonesia sudah dikatakan berhasil, dan Indonesia sudah termasuk jajaran negara demokratis di level internasional, serta dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan konflik yang serius. Mengingat Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai hajatan demokrasi dalam rangka memilih tokoh yang duduk dalam legislatif dan eksekutif, maka negara Indonesia secara periodik telah melaksanakan pemilu sejak tahun 1955 sampai 2004, dan pemilu

yang terakhir memiliki arti tersendiri karena pemilu bukan hanya memilih legislatif tetapi juga memilih eksekutif yang dilaksanakan secara langsung.

Pemilu legislatif tahun 2004 yang diselenggarakan dalam rangka memilih wakil DPR, DPRD I, DPRD II dan DPD telah melibatkan 148 juta pemilih, ada 124,45 juta yang menggunakan hak pilihnya dan telah menghasilkan suara yang sah sebanyak 113,5 juta (sumber data dari KPU 2004), dengan perkiraan biaya sekali putaran tidak kurang 1,45 triliun (145 jt X Rp 10.000,00). Jumlah pembiayaan sebanyak itu belum termasuk biaya yang dikeluarkan oleh peserta kontestan dan calon wakil sebagai biaya operasional.

Pembiayaan untuk pemilu legislatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan pemilu eksekutif mengingat pemilu legislatif dilakukan hanya sekali, sedangkan pemilu eksekutif dilakukan 4 kali (2 untuk pemilihan presiden) + (1 untuk pemilihan Gubernur) + (1 lagi pemilihan Bupati/Walikota). Indonesia memiliki 32 propinsi dan 440 kabupaten/kota, dan setiap daerah harus melaksanakan pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakilnya sehingga Indonesia akan melakukan pemilu untuk eksekutif sebanyak 474 kali selama lima tahun (Kompas, Desember 2006).

Apabila model pemilu eksekutif seperti yang dilakukan pada saat sekarang maka dampaknya bukan hanya pada pembengkakan pembiayaan yang mengalami kenaikan empat kali, tetapi juga banyaknya waktu dan tenaga yang hilang untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu tersebut, karena kalau dirata-rata dapat dipastikan bahwa dalam 4 hari pasti ada daerah yang melakukan pemilu eksekutif. Pelaksanaan Pemilu dari 2004 sampai sekarang menunjukkan bahwa ada usaha serius bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan dengan cara memilih tokoh yang representatif sebagai agen perubahan, namun demikian hasil yang diperoleh masih jauh dari yang diharapkan, bahkan ada kesan sebagai bentuk pemborosan apabila dikaitkan dengan Indonesia sedang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi.

Di samping itu, tokoh yang terpilih dalam pemilu masih banyak yang kurang mengerti kondisi pemilihnya, untuk itu perlu dipikirkan sistem penjarangan yang menghasilkan tokoh representatif dengan cara mengevaluasi terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2004. Pemilu 2004 menggunakan 2 model, yaitu langsung dan tidak langsung. Model langsung terlihat pada pemilu

eksekutif dan pemilu DPD, sedangkan model tidak langsung terlihat pada pemilu legislatif yang digunakan untuk memilih anggota DPR, baik di pusat maupun di daerah. Apabila kedua model itu dibandingkan dalam pelaksanaannya, maka keduanya memenuhi prinsip Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, dan kondisi semacam ini yang menyebabkan Indonesia mendapatkan penilaian positif dari kaca mata Internasional.

Ada pun perbedaan antara model langsung dengan tidak langsung terletak pada outputnya. Kalau model langsung, pemilih sudah tahu tentang tokoh yang diharapkan mewakilinya, sedangkan model tidak langsung, pemilih tidak tahu tokoh yang bakal mewakilinya, meskipun ia sudah mengenal partainya.

Masyarakat pemilih mengenal partai bukan karena visi dan misi yang dimiliki oleh partai tetapi melalui tokoh yang ahli dalam pembentukan opini. Kondisi semacam ini tidak perlu terjadi, seharusnya masyarakat mengenal partai melalui visi dan misi yang ditawarkan yang berbeda dengan partai lainnya bukan karena tokoh yang berfungsi pembentuk opini.

Masyarakat pemilih harus digiring agar tertarik pada partai melalui visi dan misinya dan bukan karena tokoh. Apabila masing-masing partai mengedepankan visi dan misinya sudah dapat dipastikan bahwa partai politik peserta pemilu tidak akan banyak, karena banyak partai yang memiliki visi dan misi yang sama. Sebaliknya, apabila partai lebih mengedepankan tokoh daripada pengembangan visi dan misinya dalam upaya mencari pengikutnya, maka kegiatan tersebut akan tumpang tindih dengan yang dilakukan oleh DPD. Bahaya yang muncul apabila partai mengedepankan tokoh dalam kemenangan pemilu yaitu masyarakat pemilih sebagai konstituen akan kecewa kalau tokoh pembentuk opini tidak dapat mewakilinya.

Pada umumnya masyarakat lebih mengenal tokoh daripada visi dan misi partai. Oleh karena itu kemenangan satu partai lebih banyak ditentukan oleh tokoh yang dimiliki oleh partai sebagai pembentuk opini daripada kehebatan visi dan misinya. Ironisnya, tidak semua tokoh yang memiliki peran dalam kemenangan partai terpilih sebagai wakil pemilih sebagai akibat kebijakan partai, sehingga banyak tokoh dari satu partai pindah ke partai lain atau mendirikan partai baru. Kondisi semacam ini akan menyebabkan bukan hanya merugikan partai tetapi juga banyak tokoh yang

potensial terpinggirkan, yang pada gilirannya pindah ke partai lain atau mendirikan partai baru.

D. Penutup

Sesuai dengan kondisi Indonesia yang bersifat plural, maka rekrutmen tokoh sebaiknya dimulai dari wilayah yang terkecil (desa/sejenis) dan komunitas yang sudah ada, serta dalam pengembangannya dilakukan secara berjenjang. Cara ini digunakan, mengingat tidak ada satu orang pun yang tinggal terlepas dari desa dan tidak memiliki komunitas tetapi juga karena desa sebagai teritorial kecil yang sepantasnya diakui ekistensinya sebagai alat pembelajaran dalam menghadapi perbedaan. Di samping itu, tokoh yang terpilih secara tidak langsung melestarikan dan mengembangkan komunitas yang sudah ada.

Sesuai dengan Pancasila, khususnya sila keempat dan semangat otonomi, serta sesuai dengan semangat reformasi yang mengedepankan demokrasi, seharusnya partai politik tumbuh dimulai dari daerah yang selanjutnya melakukan kolaborasi dengan daerah lain dengan berdasar atas kesamaan visi dan misi. Apabila partai politik bergerak atas visi dan misi meskipun partai politik itu muncul di daerah maka tidak akan terjadi banyak partai.

Apabila ada tokoh yang memiliki banyak pengikut, dan kurang setuju dengan partai yang sudah ada meskipun memiliki visi dan misi yang sama tidak perlu mendirikan partai baru, dan cukup menyalurkan kemampuannya melalui jalur yang sudah ada, yaitu melalui DPD. Oleh karena itu, ruang gerak dan wewenang DPD perlu diperluas bukan hanya di tingkat pusat saja tetapi juga di kabupaten dan propinsi dengan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang Undang.

Kebijaksanaan penyederhanaan partai melalui kolaborasi dengan melihat persamaan visi dan misi yang akan mengurangi partai peserta pemilu, haruslah diikuti dengan kebijaksanaan yang memberi ruang gerak dan wewenang DPD untuk menampung tokoh potensial yang kurang tertarik dengan partai politik agar dapat menjangkau tokoh yang potensial dan tidak membingungkan para pemilih pada waktu pemilihan umum.

Pemilu sebagai sarana demokrasi yang membutuhkan banyak pembiayaan perlu disederhanakan pelaksanaannya dengan cara melakukan pemilu maksimal 3 kali putaran dan dilakukan secara serentak. Pertama, Pemilu dalam rangka memilih legislatif,

kedua, pemilu dalam rangka memilih eksekutif (presiden, gubernur, bupati/walikota), ketiga, pemilu dilakukan apabila pemilu kedua belum mencapai lebih dari 50 %.

Apabila sistem rekrutmen tokoh menggunakan sistem di atas, maka tidak ada seorang pun anak bangsa potensial yang tidak terlibat, mengingat pola penjarangan tokoh dimulai dari yang kecil menuju yang besar, dan masing-masing tokoh diberi kebebasan untuk memilih saluran, yaitu jalur politik atau jalur komunitas yang merupakan *icon* masing-masing daerah (DPR atau DPD).

Sistem penjarangan ini akan menghasilkan *rasa memiliki*, bukan hanya pada tokoh yang dihasilkan tetapi juga kebijaksanaan yang dihasilkan mengingat adanya kolaborasi yang dilakukan dengan mengedepankan persamaan komunitas atau persamaan visi dan misi. Di samping itu, sistem ini akan membentuk sifat kerjasama yang kreatif yang pada gilirannya akan terbentuk kecerdasan sosial, yang sejak awal kecerdasan sosial merupakan kelemahan Bangsa Indonesia.

Manfaat lain dari sistem ini yakni sejak awal para tokoh diajak untuk mengukur kemampuannya untuk menentukan pilihan pada bidang dan level tertentu mengingat pemilu eksekutif dilakukan secara bersama-sama seperti yang dilakukan pemilihan legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Tanjung, Akbar, 2006, **Makalah Seminar Kepemimpinan Nasional dan Kebangkitan Bangsa**, Jakarta, Rabu 29 Nopember
- Fatah, Eep Sayaefulloh 2007, **“Tokoh sebagai Agen Perubahan”**, Jakarta, kompas 22 Januari
- Poerter, Michael. E, 2006, **How to Make Indonesia More Competitive**,
- Data pendukung KPU 2004